

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Kajian Teori Kesadaran

Kesadaran diartikan sebagai semua ide, perasaan, pendapat, dan sebagainya yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang. Selain itu kesadaran diartikan sebagai pemahaman atau pengetahuan seseorang tentang dirinya dan keberadaan dirinya. Kesadaran Warga Negara, Kesadaran yang dapat diartikan sebagai kualitas pribadi seseorang yang wawasan, sikap, dan perilaku yang bermuatan cita-cita dan komitmen luhur kebangsaan dan kebernegeraan Indonesia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “kesadaran adalah keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang”. Menurut Hasibuan (2012:hal 193), “kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya” Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan kesadaran adalah kondisi dimana seseorang mengerti akan hak dan kewajiban yang harus dijalankannya.

Diantara kita ada yang memiliki pandangan yang melampaui perspektif orang biasa biasa. Namun ada pula di antara kita memiliki pandangan dibawah rata-rata orang biasa. Pengakuan akan keberadaan kondisi keragaman perspektif ini di sebut kesadaran akan perspektif. Dalam hal ini, perlu dibedakan antara pendapat (*opinion*) dan perspektif. Pendapat adalah lapisan permulaan permulaan munculnya kesadaran akan perspektif. Sedangkan perspektif merupakan lapisan yang dalam dan tersembunyi yang lebih penting dalam mengenai perilaku . misalnya, dalam peradaban indonesia khususnya pada masa perjuangan kemerdekaan, bangsa indonesia menganggap ‘Kami Cinta Perdamaian tetapi lebih cinta kemerdekaan’.

2. Kajian Teori Partisipasi Warga Dalam Pembangunan

Partisipasi dalam Perencanaan Pembangunan Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan yang dikerjakan didalam masyarakat lokal. Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam

pembangunan (pedesaan) merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program yang dilaksanakan. “Dimaklumi bahwa anggaran pembangunan yang tersedia adalah relative terbatas sedangkan program pembangunan yang dibutuhkan (yang telah direncanakan) jumlahnya relative banyak, maka perlu dilakukan peningkatan partisipasi masyarakat untuk menunjang implementasi pembangunan program yang ada dimasyarakat”.

Dengan partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan diupayakan menjadi lebih terarah, artinya rencana atau program pembangunan yang disusun itu adalah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, berarti dalam penyusunan program pembangunan dilakukan penentuan prioritas (urutan berdasarkan besar kecilnya tingkat kepentingan), dengan demikian pelaksanaan program pembangunan akan terlaksana secara efektif dan efisien. Partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan dan kualitas sumber daya manusia. Jika partisipasi masyarakat aktif maka hal ini menunjukkan keberhasilan LPMD dalam menggerakkan swadaya masyarakat, namun hal ini juga bias terjadi atas dasar kesadaran masyarakat itu sendiri. LKMD merupakan wadah yang menampung aspirasi, partisipasi, kegiatan dan peranan masyarakat dalam pembangunan di daerah pedesaan. Lembaga ini mempunyai tugas membantu kepala desa dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta menggerakkan masyarakat secara aktif dan positif untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu. Usaha tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan dari pemerintah desa maupun swadaya gotong royong masyarakat. Tugas lainnya yaitu menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka mengembangkan ketahanan di desa (Kusnadi 1995) Fungsi LKMD antara lain sebagai berikut:

- a. Sebagai wadah partisipasi dalam perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan.
- b. Menanamkan pengertian dan kesadaran penghayatan serta pengamalan Pancasila.
- c. Menggali, memanfaatkan semua potensi, serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat untuk pembangunan.

- d. Sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat serta antar warga masyarakat itu sendiri.
- e. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.
- f. Membina dan menggerakkan potensi pemuda untuk pembangunan.
- g. Meningkatkan peran wanita dalam mewujudkan keluarga sejahtera.
- h. Membina kerja sama antar lembaga yang ada dalam masyarakat untuk pembangunan.
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain dalam membantu pemerintah desa untuk menciptakan ketahanan yang mantap.

3. Kajian Teori Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

LKMD merupakan wadah yang menampung aspirasi, partisipasi, kegiatan dan peranan masyarakat dalam pembangunan di daerah pedesaan. Lembaga ini mempunyai tugas membantu kepala desa dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta menggerakkan masyarakat secara aktif dan positif untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu. Usaha tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan dari pemerintah desa maupun swadaya gotong royong masyarakat. Tugas lainnya yaitu menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka mengembangkan ketahanan di desa (Kusnadi 1995, : Hlm 22).

A. Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKMD)

Tugas dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Pemerintahan Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan desa. Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dan d. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Lembaga kemasyarakatan, Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1) mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan masyarakat. (Sumber : Kumpulan Peraturan tentang Kecamatan dan Kelurahan hlm. 48).

B. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sebagai Fasilitator

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan disegala bidang dan sector kehidupan (Sutoro Eko, 2002) Salah satu tugas dari LPM adalah memfasilitasi kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan. Mengingat fungsi LPM sebagai wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat dan juga sebagai mitra pemerintahan kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi kebutuhan demokrasi masyarakat dibidang pembangunan maka Peran LPM sebagai fasilitator adalah memfokuskan pada mendampingi masyarakat didalam melakukan rencana-rencana pembangunan. Rencana-rencana pembangunan di Kelurahan Karas dapat dilakukan dengan melaksanakan musyawarah rencana/pembangunan/Musrenbang.

Peran LPM sebagai fasilitator di Desa Bojongsoang Kabupaten Bandung adalah memfasilitasi segala aktivitas masyarakat mengenai program pembangunan yang direncanakan kemudian untuk dilaksanakan. Sebagai fasilitator LPM selain mengusulkan pembangunan juga melakukan pendampingan terhadap perangkat perangkat RT dan RW di Kelurahan. Peran LPM di Desa Bojongsoang Kabupaten Bandung memang terlihat sebagai fasilitator didalam upaya menyusun rencana pembangunan hal ini ditandai dengan program LPM didalam melakukan aktivitas rapat dan hearing antara perangkat kelurahan yang mewakili warga masyarakat dengan pemerintah kecamatan, DPRD Kota dan juga perusahaan disekitar kelurahan. Oleh karenanya lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan juga melakukan inisiatif untuk mengupayakan pembangunan dan upaya pencarian solusi terhadap persoalan yang ada di Desa Bojongsoang Kabupaten Bandung.

C. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sebagai Mediator

Lebih lanjut dinyatakan bahwa Kader Pemberdayaan Masyarakat merupakan mitra Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang diperlukan keberadaannya dan peranannya dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di Desa dan Kelurahan. Adapaun peran Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) intinya adalah mempercepat perubahan. LPM sebagai mediator dalam pembangunan adalah mempunyai tugas mensosialisasikan hasil-hasil usulan rencana pembangunan yang sudah ditetapkan dan dijadikan rancangan pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan kelurahan terpadu kepada semua elemen masyarakat. LPM Kelurahan Karas mensosialisasikan hasil rancangan yang akan diusulkan dalam musyawarah pembangunan melalui sosialisasi kerumah-rumah warga kelurahan dan juga melalui bentuk undangan rapat. Kondisi geografis yang menjadi penyebab hambatannya pembangunan dan rentannya bencana alam memiliki pengaruh yang kuat dalam proses pembangunan kelurahan.

D. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sebagai Motivator

Motivator ini dipandang sebagai ujung tombak dan pionir pembangunan maka tantangannya adalah bagaimana membentuk para motivator-motivator pemberdayaan masyarakat. Motivator ini bisa para tokoh yang ada di masyarakat maupun segenap aparat pemerintahan yang ada di desa atau kelurahan, kecamatan bahkan tingkat kabupaten atau kota. Banyak hal yang harus dipersiapkan baik kesiapan ketahanan personal, kemampuan memahami lingkungan dan modal sosialnya, kemampuan mengajak, memobilisasi, menjembatani, serta kemampuan untuk menjadi fasilitator. Sehingga peran motivator sangat penting dan strategis.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, motivator menempatkan dirinya sebagai garda. Bimbingan, pembinaan, dan atau pengarahan dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses memelihara, menjaga dan memajukan organisasi melalui setiap pelaksanaan tugas personal, baik secara struktural maupun fungsional, agar pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan tidak terlepas dari usaha mewujudkan tujuan Negara atau cita-cita bangsa Indonesia (Hawawi, Handari; 1988, hlm. 110).

Perkataan pembinaan ini mempunyai cakupan kegiatan yang cukup banyak, akan tetapi yang jelas pembinaan mengandung arti pembangunan yaitu merubah sesuatu sehingga menjadi baru yang mempunyai nilai yang lebih tinggi dan juga mengandung makna sebagai pembaruan, yaitu usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan, menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Dalam hubungannya dengan pembinaan, Taliziduhu Ndraha mengungkapkan bahwa yang menjadi sasaran pembinaan khususnya dalam pembinaan masyarakat adalah mentalitasnya. Mentalitas yang belum sadar harus dibangun, yang tidak sesuai dengan pembangunan harus dirubah, yang belum beres harus ditertibkan dan yang masih kosong harus diisi.

E. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sebagai Dinamisor

Bahwa dalam mengoptimalisasikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, LPM jeli dan bijaksana dalam memantau dan melihat berbagai kegiatan dimasyarakat yang selalu dinamis, menempatkan dirinya ditengah-tengah masyarakat untuk bisa langsung terjun mendorong masyarakat untuk lebih berperan aktif terlibat dalam kegiatan pembangunan di masing-masing wilayah ialah berdomisili. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik ditanah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan (Sutoro Eko, 2002). Dengan kata lain ia lebih berada pada dimensi proses dari kebijakan penerapan ke kebijakan hasil/dampak. Artinya, kegiatan ini akan menghasilkan sejumlah pemahaman dan penjelasan berkenaan dengan proses penerapan program yang dipantau. Kegiatan ini lebih mengarah pada pemenuhan kebutuhan informasi. Pengawasan diperlukan untuk menyesuaikan perencanaan dan bentuk pembangunan dengan memperkecil dampak negatif yang mungkin ditimbulkan.

4. PKN Sebagai Media Pendidikan Politik Dalam Menumbuhkan Kesadaran Partisipasi Warga

Menyiapkan program pendidikan bagi warga negara bertujuan agar setiap warga negara menjadi warga negara sebagaimana yang diharapkan oleh negara. Pemerintahan pada setiap negara mempunyai cita-cita tentang warga negaranya ke depan yang diantaranya dilakukan melalui pkn. Hal itulah diantaranya yang membedakan pkn antara negara satu dengan yang lainnya di samping faktor perbedaan lainnya serta psikologi pendidikan dalam mewujudkan upayanya itu. Perkembangan ilmu kewarganegaraan (*Civics*) dan pendidikan kewarganegaraan *Civics Education* di Amerika Serikat tanpa mengabaikan pkn di negara-negara lainnya. Rusia misalnya melalui *obchestvovedenie* melakukan pendidikan kewarganegaraan bagi para pemuda dan pionir muda Uni Soviet. Pada awalnya perkembangan pembelajaran *Civics* di Amerika tersebut di dasarkan pada teori psikologi yang memang sedang menjadi panutan dikala itu yaitu "*Faculty Psychology*" yang menekankan pada teori yang menyatakan bahwa pelajaran yang terpenting adalah "*mind and body*" dan menurut teori ini apabila terjadi kekeliruan dalam belajar maka yang salah bukanlah terletak pada *body* (badan) akan tetapi lebih pada *mind* (pikiran). *Faculty Psychology* atau dikenal juga "*field psychology*" yang menekankan bahwa keseluruhan adalah lebih penting dari bagian yang dicontohkan dengan nada adalah bagian sedang melodi adalah keseluruhan.

Dalam kaitannya dengan PKN maka teori ini mendukung pembelajaran PKN yang secara umum harus ditekankan pada upaya melatih pikiran para pelajar dengan menghafal (*rote memory/memorization*). Mengarahkan dan menasihati secara teratur dengan bahan yang baik-baik. Cara ini lebih mengarah pada pengajaran *civics* dan kewarganegaraan yang bersifat indoktrinasi atau juga di sebut "*patriot like think*" lembaga pendidikan politik tersebut sehingga partisipasi politik siswa meningkat yang ditandai dengan siswa memiliki pengetahuan, sikap, dan perilaku politik yang ditandai dengan kesadaran siswa berpartisipasi dalam pemilihan ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah dan ikut aktif dalam Organisasi lainnya yang ada di sekolah, perilaku politik siswa meningkat yang ditandai dengan kemampuan siswa berpendapat didalam kelas, dan partisipasi politik siswa juga meningkat dilihat dari

tingkat partisipasi siswa dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler sangat aktif. Kesimpulan pendidikan politik merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan partisipasi politik. Untuk itu kepada semua pihak disarankan agar memiliki kepedulian terhadap pendidikan politik agar partisipasi politik dapat meningkat.

A. Awal perkembangan Civic's dan Civic Education (PKN) di Amerika Serikat

Pada awalnya perkembangan pembelajaran *Civics* di Amerika tersebut di dasarkan pada teori psikologi yang memang sedang menjadi panutan dikala itu yaitu "*Faculty Psychologi*" yang menekankan pada teori yang menyatakan bahwa pelajaran yang terpenting adalah "*mind and body*" dan menurut teori ini apabila terjadi kekeliruan dalam belajar maka yang salah bukanlah terletak pada *body* (badan) akan tetapi lebih pada *mind* (pikiran). *Faculty Pschology* atau dikenal juga "*field pschology*" yang menekankan bahwa keseluruhan adalah lebih penting dari bagian yang dicontohkan dengan nada adalah bagian sedang melodi adalah keseluruhan.

Dalam kaitannya dengan PKN maka teori ini mendukung pembelajaran PKN yang secara umum harus ditekankan pada upaya melatih pikiran para pelajar dengan menghafal (*rote memory/memorization*). Mengarahkan dan menasehati secara teratur dengan bahan yang baik-baik, cara ini lebih mengarah pada pengajaran civics dan kewarganegaraan yang bersifat indoktrinasi atau juga di sebut "*parrot like instruction*" atau "*watering down*". Sekaitan dengan hal diatas, dalam prinsip-prinsip pembelajaran di Amerika Serikat paling tidak ada dua prinsip yang digunakan masing-masing "*what to think*" dan "*how to think*". Yang pertama menekankan pada bahan-bahan pilihan yang dianggap baik dan ditetapkan oleh pemerintahan sebagai materi pelajaran telah diterima oleh masyarakat.

Menekankan pentingnya penanaman (*values*) selain patriotism "*democratic values, basic values of our democratic society is freedm of thought*". Sebagai lawan terhadap dominasi ilmu-ilmu social terhadap *studies social* yang sangat menekankan padaa "*empirical*", *factual decision making* ", dan dalam model ilmu-ilmu *social* menekankan pada testing hipotesis dan keputusan tidak dipengaruhi oleh selain dari *fundamental scientific commitment to*

truth, honesty, independence, freedom of expression, originality, and respect for ideals (Bronowski, 1997).

B. Perkembangan civics dan pkn di Indonesia

Perkembangan ilmu kewarganegaraan *Civic's* dan PKN di Indonesia banyak dipengaruhi oleh perkembangan *civic's* dan *Civic's education* Di dunia dalam aspek content maupun metode pembelajaran. dalam konteks Sistem penyampaian pembelajaran (*Instructional Delivery*) sistem pun tidak dipukul tidak dipungkiri hingga muncul kesan bahan sebagai doktrin. hal seperti itu adalah wajar karena bahan pelajaran sudah dianggap baik dan benar Oleh sebagian Besar penduduk. lebih lanjut proses belajar mengajar menggunakan metode induktinnasi. selain bahan-bahan pelajaran Yang bersifat doktrin seperti itu juga ada bahan-bahan yang dianggap Telah diterima oleh umumnya warga negara atau penduduk di negara tersebut. Bagi bangsa Indonesia hal yang serupa itu adalah Pancasila dan undang-undang dasar 1945 yang juga sering di sebut "*The Great Oughts*" nilai-nilai yang terkandung di dalamnya "dianggap telah bener" yang kebenaran secara umum telah dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat dan bahkan telah diakui oleh bangsa-bangsa lain telah mendukung dan bahkan membantu perjuangan bangsa indonesia dalam memperjuangkan dan menegakkan kebenaran dan kemerdekaannya.

Nilai-nilai luhur tersebut Hukum buka (begitu masyarakat/bangsa Indonesia menyebutnya) merupakan nilai-nilai yang yang harus dipahami , dihayati dan dan dilaksanakan oleh setiap warga negara dalam berbagai dimensi kehidupan Sebagai warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. prinsip pembelanjaan bagi warga negara yang berikutnya telah Bergerak dari prinsip "*what to think*" Indoktrinasi ke arah yang lebih menekankan aspek kebebasan, keterbukaan dan jati diri lebih berorientasi pada nilai nilai demo demokratis yaitu prinsip "*how to think*" Yang menekankan kan kemampuan berpikir sebagai salah satu aspek penting dalam prinsip kemajuan berpikir sebagai salah satu aspek penting dalam prinsip dan kehidupan demokratis. metode pembelajarannya berbeda dengan yang pertama. pada prinsip pembelajaran yang pertama, "*what to think*" , begitu apa yang akan dipelajari telah disiapkan, Dan ditetapkan organ negara yang harus disampaikan oleh sekolah Melalui guru.

Prinsip Pembelajaran kedua adalah sebaliknya dari apa yang Lakukan pada

prinsip pembelajaran yang pertama. pada prinsip pembelajaran yang kedua ini yang menganut pendekatan "How to think" yaitu mengajarkan Tentang bagaimana Berpikir itu apa yang telah ditetapkan di dalam kurikulum (Termasuk Kurikulum yang ditetapkan secara sentralistik) dan apa kali sekarang tekan ditetapkan secara desentralistik bahan-bahan kurikulum tersebut pada dasarnya adalah "seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu "Uuspn no 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 19. dalam pendekatan pembelajaran tersebut guru tidak lagi bertindak sebagai "juru bicara".

C. Kajian Teori Pendidikan Politik

Hingga saat ini,, apa yang dipelajari oleh siswa siswa akan anda tentang politik dapat dideskripsikan sebagai *Civics* Daripada pendidikan politik titik pembelajaran sangat bersifat faktual, menekankan pada struktur dan institusi pemerintahan sementara mengabaikan proses politik Memusatkan pada latar belakang sejarah dengan mengorbankan isu-isu Terkini dan kontroversial, dan umum kurang terkait dengan kebutuhan dan pengalaman belajar siswa . Secara implisit dan terkadang Eksplisit, penangan kewarganegaraan dalam pendekatan tradisi ini memandang tugas utama warga negara meliputi pemungutan suara. kegiatan dalam pemilu . cara politik yang aktif Umumnya diabaikan. intinya, nilai-nilai kewarganegaraannya yang pokok dipandang sebagai suatu keyakinan, penerimaan, dan loyalitas.

Pada tahun-tahun terakhir telah melihat mulai ada perubahan dari dimensi kewarganegaraan tradisional idealis menjadi pendidikan politik yang orisinal walaupun bersifat pasif yang fokusnya pada dunia politik dan tindakan politik nyata. di Kanada, dimanapun, orang melihat ada perubahan ke arah pendidikan politik yang memfokuskan pada masalah-masalah atau isu-isu tentang partisipasi, inkuiri kritis, keterkaitan kelas dunia politik diluar, dan seringkali melibatkan masyarakat lokal. para siswa sekolah dasar dan sekolah menengah di semua propinsi semakin terlibat dalam isu-isu sosial politik seperti terlibat dalam kampanye pemilu berbagai kesempatan dan gerakan aksi politik , kelompok aksi

kemasyarakatan, kampanye HAM, dan aktivitas anti rasisme dan anti diskriminasi.

lembaga pendidikan politik tersebut sehingga partisipasi politik siswa meningkat yang ditandai dengan siswa memiliki pengetahuan, sikap, dan perilaku politik yang ditandai dengan kesadaran siswa berpartisipasi dalam pemilihan ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah dan ikut aktif dalam Organisasi lainnya yang ada di sekolah, perilaku politik siswa meningkat yang ditandai dengan kemampuan siswa berpendapat didalam kelas, dan partisipasi politik siswa juga meningkat dilihat dari tingkat partisipasi siswa dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler sangat aktif. Kesimpulan pendidikan politik merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan partisipasi politik. Untuk itu kepada semua pihak disarankan agar memiliki kepedulian terhadap pendidikan politik agar partisipasi politik dapat meningkat.

5) Kajian Teori Pendidikan Kewarganegaraan

A. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik, diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya: pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. (Egan Gavriel, 2015, hlm.23).

Menyiapkan program Pendidikan kewarganegaraan bagi warga negara bertujuan agar setiap warga negara menjadi warga negara sebagaimana yang di harapkan oleh negara. Pemerintahan pada setiap negara mempunyai cita-cita tentang warga negaranya kedepan yang di antaranya di lakukan melalui pkn. (Abdul Aziz Wahab ; 2011, hlm. 2).

Pada awalnya perkembangan pembelajaran civic di Amerika tersebut di dasarkan pada teori psikologi yang memang sedang menjadi panutan dikala itu yaitu *faculty psychology* yang menekankan pada teori yang menyatakan bahwa dalam pelajaran yang terpenting adalah *mind and body* dan menurut teori ini apabila menjadi kekeliruan dalam belajar maka yang salah bukanlah terletak pada *body* (badan) akan tetapi lebih kepada *mind* atau pikiran. *Faculty psychology* atau dikenal juga dengan *field psychology* yang menekankan bahwa keseluruhan adalah lebih

penting dari bagian yang di contohkan dengan nada adalah bagian sedangkan melodi adalah keseluruhan. (Abdul Aziz Wahab ; 2011, hlm. 4).

Dapat disimpulkan bahwa pkn mengemban misi utama memupuk dan mengembangkan warga negara agar memiliki nilai-nilai patriotism serta membangun komitmen terhadap nilai-nilai demokratis yang dilandasi oleh komitmen terhadap nilai-nilai kebenaran, kejujuran, kemerdekaan, rasa hormat, dan kebebasan berekspresi semua unsur tersebut merupakan nilai-nilai dasar masyarakat dan merupakan bagian utama dari bagian Pendidikan kewarganegaraan. (Abdul Aziz Wahab ; 2011, hlm. 5).

Perkembangan ilmu kewarganegaraan dan pkn di Indonesia banyak dipengaruhi oleh perkembangan *civic* dan *civic education* di dunia baik dalam aspek *conten* maupun metode pembelajaran. Daalam kontek system penyampaian pembelajaran (*instructional delivery system*) tidak dipungkiri hingga muncul kesan bahan sebagai doktrin. Hal seperti itu adalh wajar karena bahan pelajaran sudah di anggap baik dan benar oleh Sebagian penduduk lebih lanjut, proses belajar mengajar menggunakan metode indoktrinasi selain bahan-bahan pelajaran yang bersifat doktrin seperti itu juga ada bahan-bahan yang dianggap telah diterima oleh umumnya warga negara atau penduduk di negara tersebut bagi bangsa Indonesia hal yang serupa itu adalah Pancasila dan UUD1945 yang juga sering disebut "*the greats oughts*" (Abdul Aziz Wahab ; 2011, hlm. 6).

Secara historis, PKn di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Secara sosiologis, PKn Indonesia dilakukan pada tataran sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Secara politis, PKn Indonesia lahir karena tuntutan konstitusi atau UUD 1945 dan sejumlah kebijakan Pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya. (Egan Gavriel ; 2015, hlm.23)

Pendidikan Kewarganegaraan senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. PKn Indonesia untuk masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, eksistensi konstitusi negara, dan tuntutan dinamika perkembangan bangsa.

B. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapat pengetahuan, sikap/nilai dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas (*smart and good citizen*) untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusional. Perkembangan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Indonesia memiliki sejarah panjang dalam peranannya mempersiapkan warga negara yang baik sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Pendidikan Kewarganegaraan adalah Pendidikan Tindakan cerdas, penuh dengan rasa tanggung jawab dari seseorang yang akan berhubungan dengan negara, dengan memecahkan masalah hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang menerapkan dari konsepsi falsafah Bangsa. Pendidikan kewarganegaraan yang berhasil akan membuahakan sikap mental yang cerdas, penuh rasa tanggung jawab, yang disertai dengan perilaku sebagai berikut:

- a) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan menghayati nilai-nilai falsafah bangsa.
- b) Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- c) Rasional, dinamis, dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.
- d) Bersifat profesional, yang dijiwai oleh kesadaran Bela Negara.
- e) Aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa, dan negara.

Melalui Pendidikan kewarganegaraan, warga negara diharapkan mampu memahami, menganalisis dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa, dan negaranya secara berkesinambungan, konsisten, dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti yang digagaskan dalam Pembukaan UUD 1945 (S.Sumarsono ; 2006, hlm.6).

6) Hubungan PPKn dengan LPMD

PKN merupakan salah satu cabang dari ilmu sosial yang didalamnya terdapat nilai-nilai sosial masyarakat yang mengarah terhadap kesadaran masyarakat sebagai warga negara yang mempunyai kewajiban dan hak dalam keikutsertaannya sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan serta pembangunan masyarakat melalui proses secara langsung yaitu berupa ikut secara aktif dan nyata didalamnya serta dapat juga dilakukan secara tidak langsung yaitu berupa penyampaian pendapat, aspirasi atau masukan terhadap proses serta rancangan pembangunan, hal tersebut selaras atau sejalan dengan hakikat LPMD yaitu sebagai lembaga atau wadah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan serta LPMD juga ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: 1. Pemberdayaan masyarakat 2. Peningkatan peranserta masyarakat dalam proses pembangunan pengembangan kemitraan 3. Peningkatan pelayanan masyarakat dan 4. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat setempat.

7. Penetian terdahulu

No	Tahun	Judul	Hasil
1	Abid Muhtarom (2014)	Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pembangunan di desa di Kabupaten Lamongan	Begitu pula dengan Potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga, mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara sektoral dalam kepengurusan / nepotisme maka dari itu harus dihilangkan. Ke depan, pengurus LPM harus dipilih dari orang-orang yang punya kemampuan dalam pengelolaan pembangunan

No	Tahun	Judul	Hasil
			<p>desa, serta mempunyai kemauan, kepedulian dan komitmen yang tinggi dalam pemberdayaan masyarakat.</p> <p>maka dari itu harus dihilangkan. Ke depan, pengurus LPM harus dipilih dari orang-orang yang punya kemampuan dalam pengelolaan pembangunan desa, serta mempunyai kemauan, kepedulian dan komitmen yang tinggi dalam pemberdayaan masyarakat.</p>
2.	M. Farhan Fauzi (2018)	Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa Wonggahu Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo	Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sangat menentukan arah perkembangan suatu desa, baik dari segi pembangunan desa maupun perkembangan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal pembangunan desa ataupun perkembangan masyarakat merupakan seluruh kegiatan pembangunan desa yang berlangsung dan juga unsur yang tidak bisa terlepas dari pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat
3	Sitti	PERAN	1. Pada prinsipnya partisipasi

No	Tahun	Judul	Hasil
	Rahmatyah (2019)	LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN WATONEA KECAMATAN KATOBU KABUPATEN MUNA	<p>masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa ini sangatlah pembangunan dapat berjalan dengan baik peran daripada masyarakat sangat penting dalam hal pembangunan.</p> <p>2. Kepada masyarakat Dalam setiap program pembangunan seharusnya masyarakat harus terlibat dalam proses pembangunan oleh karena itu masyarakat harus memiliki kesadaran dari dalam dirinya untuk sadar akan pentingnya partisipasi terhadap pembangunan, Juga kepada seluruh masyarakat desa Talikuran untuk lebih meningkatkan partisipasinya (keikutsertaannya) baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam pengawasan.</p> <p>3. Kepada pemerintah, Agar partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan infrastruktur maksimal, pemerintah harus lebih memberikan sosialisasi atau pengarahan kemasyarakat</p>

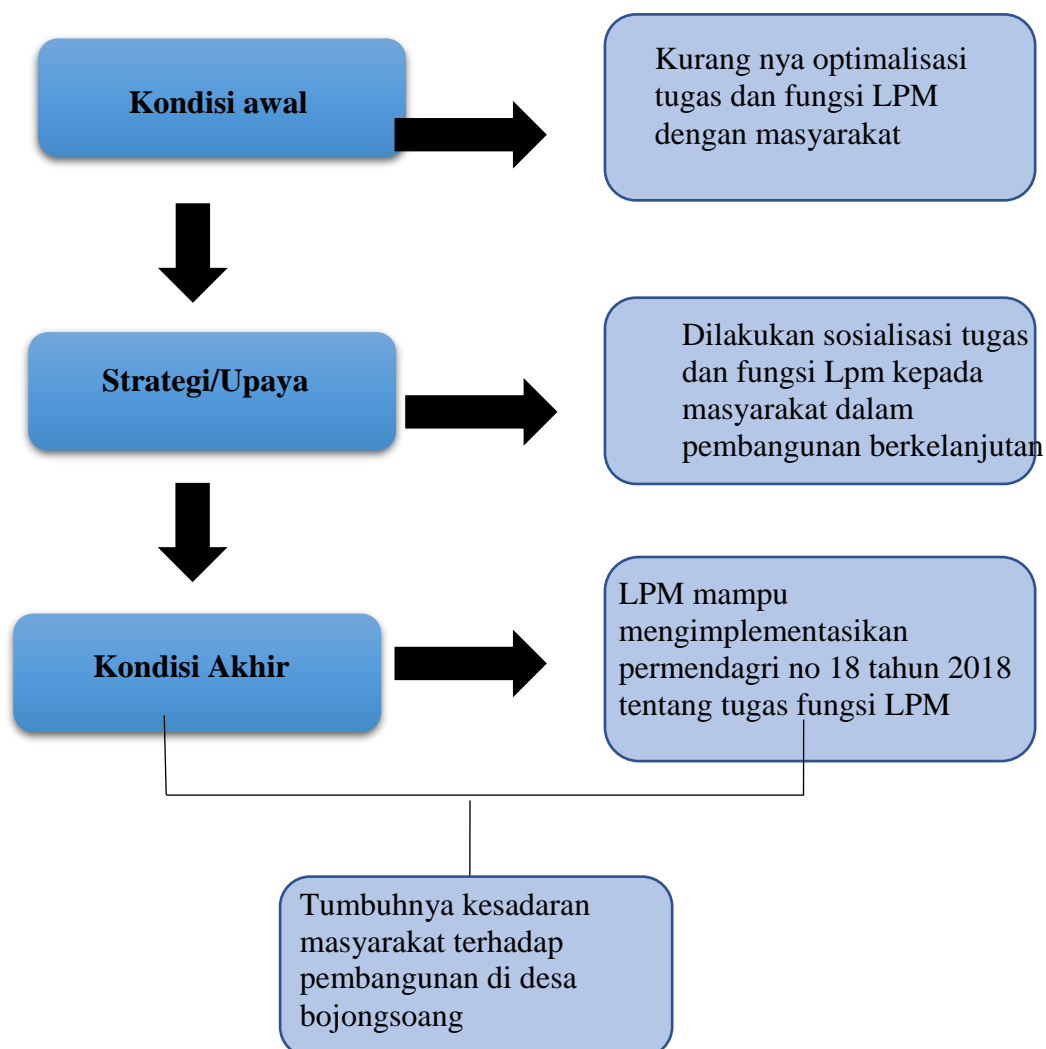
No	Tahun	Judul	Hasil
			<p>dalam bentuk penyuluhan yang melibatkan masyarakat, agar masyarakatnya memiliki keinginan untuk ikut terlibat dalam kegiatan pembangunan.</p>
4	YUNI KURNIYATI (2019)	PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA MULYOOREJO 1 KECAMATAN BUNGA MAYANG KABUPATEN LAMPUNG UTARA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat partisipasi masyarakat Desa Mulyorejo 1 dapat dilihat pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan yang tergolong baik dalam partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan serta pemeliharaan. 2. Faktor Pendukung dan penghambat sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) Faktor pendukung <ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa yang berkooperatif dan komunikasi efektif dalam meregulasi ADD di wilayah Desa Mulyorejo 1 sehingga pelaporan pertanggung jawaban dapat dilaporkan dengan waktu yang telah ditentukan. 2) Partisipasi masyarakat meningkatkan karena

No	Tahun	Judul	Hasil
			<p>kesadaran untuk membangun desa telah tertanam dari dalam diri mereka untuk berkontribusi dalam pengelolaan ADD. 3) Sikap pemerintah desa yang transparan, akuntabel dalam memanfaatkan dana ADD.</p>
5	<p>Inggrid Kawulur (2020)</p>	<p>PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFARSTRUKTUR DI DESA TALIKURAN KECAMATAN TOMPASO KABUPATEN MINAHASA</p>	<p>A. Pada prinsipnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa ini sangatlah pembangunan dapat berjalan dengan baik peran daripada masyarakat sangat penting dalam hal pembangunan.</p> <p>B. Kepada masyarakat Dalam setiap program pembangunan seharusnya masyarakat harus terlibat dalam proses pembangunan oleh karena itu masyarakat harus memiliki kesadaran dari dalam dirinya untuk sadar akan pentingnya partisipasi terhadap pembangunan, Juga kepada seluruh masyarakat desa Talikuran untuk lebih meningkatkan partisipasinya (keikutsertaannya), pelaksanaan, maupun baik dalam perencanaan dalam</p>

No	Tahun	Judul	Hasil
			pengawasan.

B. Kerangka Berfikir

Kerangka pikir dibuat untuk mempermudah proses penelitian karena mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pembangunan berkelanjutan yang ada di Desa Bojongsoang, ingin mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Wisata Pentingsari dan ingin mengetahui dampak positif dan negatif dari pemberdayaan yang dilakukan di Desa bojongsoang.



2.1 Tabel Kerangka Berfikir